

Analisis Kinerja Keuangan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dengan Penerapan *Value for Money* Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang

Desti Wulandari¹, Feronika Rosalin²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Darma Pratama

E-mail: desti.w2013@gmail.com¹, feronikarosalin@gmail.com²

Abstrak

Dinamika perkembangan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang diharapkan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu organisasi baik pemerintah dapat terlihat dengan kemampuan pemerintah atau instansi tersebut didalam mengelola sumber daya secara optimal sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana yang dituangkan dalam perencanaan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang dengan menerapkan konsep *value for money*. Pengumpulan data diambil dari laporan anggaran dan pendapatan, serta wawancara dengan pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan tiga alat ukur yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja keuangan UPTD Pengujian Kendaraan bermotor kota Palembang tahun 2017 menunjukkan rasio ekonomi sebesar 102,31 % (ekonomis), rasio Efisien sebesar 127,04% (tidak efisien) dan rasio efektivitas sebesar 146.18 % (efektif).

Kata Kunci : Kinerja, *Value For Money*, Belanja, Pendapatan

Abstrack

The dynamics of the development of the organizational environment both internally and externally is very influential on the success or failure of an organization in achieving performance as expected. Through performance measurement, the success of an organization both government can be seen with the ability of the government or agency to manage resources optimally so that the expected results match with a plan outlined in strategic planning. This study aims to analyze financial performance at the UPTD for Motor Vehicle testing in the City of Palembang by applying the concept of value for money. Data collection is taken from the budget and income reports, and interviews with the UPTD Testing of Motor Vehicles in Palembang. This uses three measuring instruments, namely economical, efficient, and effectiveness. The results of this study indicate that the financial performance of the UPTD for testing motor vehicles in Palembang in 2017 shows the ratio of economists i amounted to 102.31% (economical), the efficient ratio was 127.04% (inefficient) and the effectiveness ratio was 146.18% (effective).

Keywords : *Perfomence, Value For Money, Expense and Profit*

¹Alumni, ²Dosen

PENDAHULUAN

Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu organisasi baik pemerintah dapat terlihat dengan kemampuan pemerintah atau instansi tersebut didalam mengelola sumber daya secara optimal sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana yang dituangkan dalam perencanaan strategis. Kelemahan dari pengukuran kinerja khususnya pada pelaksanaan saat ini, hanya mengukur kinerja dengan membandingkan anggaran dan realisasinya, tanpa adanya pertimbangan dan perhitungan akan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja dengan *value for money*. Mardiasmo (2002:18)

Abdul Halim (2009:132) menyatakan, konsep *value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja. Mardiasmo (2009:4) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, antara lain ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan. Dengan kata lain, ekonomis adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Steers (1985:5) yang menyatakan bahwa efektivitas paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut keberhasilan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha

mengejar tujuan operasi dan tujuan operasionalnya, terutama jika pada organisasi pemerintahan yang tidak bertujuan mencari laba melainkan berorientasi kepada pencapaian efektivitas

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir. Mardiasmo (2009:4)

Ahmad Yani (2002:63), Retribusi Uji Kendaraan Bermotor termasuk dalam retribusi daerah sebagai retribusi jasa umum seperti yang diterangkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/umum atau badan. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah kota Palembang. Retribusi ini memiliki peranan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Kota Palembang sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki potensi untuk berkembang dan mengupayakan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah melalui jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang, dengan memungut dan mengelola retribusi pengujian kendaraan bermotor. Mengingat begitu besarnya kontribusi dari retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang maka Dinas Perhubungan kota Palembang sebagai instansi pengelola pengujian

kendaraan bermotor harus meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sehingga hasil yang didapat dari pengujian kendaraan bermotor ini bisa mencapai target pendapatan sesuai yang ditentukan.

Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena berperan sebagai alat yang membantu pergerakan orang atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan efisien, efektif dan ditempuh dalam waktu relatif singkat. Sehingga dalam konteks pergerakan orang maka transportasi berperan sebagai agen pengembangan dan menjadi sarana pengisi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, maka dari itu dilakukan pengujian. Namun saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu yang melakukan uji kendaraan bermotor, yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus, angkutan umum, dan kereta tempel/gandeng.

Sebagai Instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palembang yang melakukan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008. Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja selama ini menggunakan LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai impress Nomor 7 Tahun 1999. Pelaporan kinerja ini

dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam suatu anggaran yang dikaitkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Di samping itu, aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan yang diperoleh juga diuraikan didalam LAKIP, namun belum mempertimbangkan dan memperhitungkan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Untuk itu bisa dikatakan pengukuran kinerja keuangan pada salah satu instansi pemerintah ini belum menekankan konsep *value for money*. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba melakukan pengukuran kinerja dengan penerapan *value for money* untuk menilai dan meningkatkan kinerja akuntabilitas keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang melalui Unit Pelaksanaan Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011:2).

Pengertian lain diberikan oleh (Jumingan, 2006:239), mendefinisikan kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran

dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Sementara itu, menurut (Sutrisno, 2009:53), kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Srimindarti (2006:34), adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Menurut Munawir (2012:31), menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut

dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

Analisis Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi (Jumingan, 2006:242)

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (*absolut*) maupun dalam persentase (*relatif*).
2. Analisis Tren (*tendensi posisi*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per-komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk

mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.

7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis *Break Even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Penilaian Kinerja Keuangan

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Pengertian APBN dan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada hakikatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Secara singkat, APBN didefinisikan sebagai daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah. Anggaran mengandung sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dengan skala yang lebih besar dan jenis kegiatan yang rumit

Landasan hukum APBN, yaitu Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, yang mengatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, pemerintah memakai anggaran tahun lalu. Struktur dasar APBN terdiri atas sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara. Sisi penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri (migas, pajak, dan bukan pajak), dan penerimaan luar negeri atau bantuan luar negeri yang disebut juga penerimaan pembangunan meliputi bantuan program dan bantuan proyek.

Adapun sisi pengeluaran negara, terdiri atas pengeluaran rutin (antara lain: belanja barang, belanja pegawai, dan subsidi daerah otonom), dan pengeluaran pembangunan yang merupakan biaya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Penerimaan pembangunan dalam anggaran negara ditujukan untuk menutupi kekurangan penerimaan yang lebih kecil.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seperti halnya kebijakan fiskal dalam APBN, keuangan daerah yang ditunjukkan dalam APBD juga menggambarkan tentang perkembangan kondisi keuangan dari suatu pemerintahan daerah. APBD adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu.

Landasan hukum APBD adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi APBN dan APBD

Fungsi APBN dan APBD menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Otorisasi, fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi, fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi Distribusi, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara dan daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tujuan Penyusunan APBN dan APBD

Tujuan penyusunan APBN atau APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pengertian Value For Money

Mardiasmo (2009:127), *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama.

Mahsun (2006:132), *value for money* adalah pengukuran kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Secara umum *Value for money* adalah penerapan ketiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomis berkaitan dengan pemilihan dengan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling rendah.

Selaras dengan pendapat Nordiawan, 2006 dalam bukunya, yang menyatakan bahwa *value for money* merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for money* yaitu indikator yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.

Manfaat Value For Money

Halim dan Mahsun (2006:186), konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat berupa :

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pemberian layanan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena kehilangan inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
- d. Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik.
- e. Meningkatnya kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Langkah-Langkah Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Value For Money

Manajemen kinerja terintegrasi (*intergrated performance management*) terdiri atas dua bagian, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja terdiri atas empat tahap, yaitu :

- a. Penentuan visi, misi dan tujuan (*goal*), serta strategi.
- b. Penerjemahan visi, misi, dan tujuan (*goal*), serta strategi ke dalam :
 1. Sasaran strategik
 2. Inisiatif strategik
 3. Indikator kinerja (*input, output, outcome, benefit, impact*) Target kinerja
- c. Penyusunan program
- d. Penyusunan anggaran

Sementara itu, sementara itu kerangka pengukuran kinerja *value for money* dibangun atas tiga komponen utama, yaitu :

- a. Komponen visi, misi, tujuan, sasaran, dan target.
- b. Komponen, *input, output*, dan *outcome*
- c. Komponen pengukuran ekonomi, efisien, dan efektivitas.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain berdasarkan fakta yang ada. Pendekatan deskriptif diperoleh dari data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, diolah dan dianalisis dengan tepat kemudian diinterpretasikan. Penelitian jenis deskriptif ini menerjemahkan dan menguraikan data secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam penerapan *Value for money* atas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan kota Palembang.

Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan penulis adalah data Primer. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi data anggaran belanja dan realisasinya tahun 2015-2017, data anggaran pendapatan dan realisasinya tahun 2015-2017.

Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu dengan meminta data laporan anggaran belanja dan anggaran pendapatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang. Wawancara dilakukan secara langsung dengan bagian keuangan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang.

Metode Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan menyajikan data

serta menghitung kinerja dengan menerapkan konsep *value for money* untuk mengukur *ekonomi, efisiensi, dan efektivitas* terhadap anggaran belanja dan pendapatan

serta terhadap *output, outcome, benefit impact* di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang

Langkah-langkah penerapan *value for money* pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang adalah sebagai berikut :

a. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang digunakan;

Rumus Pengukuran Ekonomi :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input Rencana (Anggaran)}}{\text{Input Realisasi (Pencapaian)}} \times 100\%$$

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi:

Rumus Pengukuran Efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$$

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas, yaitu perbandingan antara *outcome* per *output*;

Rumus Pengukuran Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%$$

- Manfaat sosial neto (*net sosial benefit*), yaitu unit *outcome* yang berhasil;
- Efisiensi biaya (*cost efficiency*), yaitu kos per unit *output* atau *output* per rupiah kos;
- Efektifitas Biaya (*cost effectiveness*), yaitu kos untuk mencapai *outcome*
- Biaya manfaat (*benefit cost*), yaitu *net sosial benefit* per rupiah *cost*
- Ukuran pencapaian *output*, Hasil langsung yang dapat dirasakan dari suatu proses
- Untuk pencapaian *outcome*, efek jangka panjang dari suatu proses tersebut.

Untuk menilai pencapaian Kinerja dengan penerapan konsep *Value for Money* (ekonomis, efektivitas, efisien) digunakan cara berikut :

Tabel 1
Pengukuran Kinerja

Kriteria Kinerja 3E	Nilai Kinerja	Keterangan
$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input Rencana (Anggaran)}}{\text{Input Realisasi (Pencapaian)}} \times 100\%$	Nilai Kinerja Ekonomi	
	- > 100 %	- Ekonomis
	- 85 s.d 100 %	- Cukup Ekonomis
	- 65 s.d 84 %	- Kurang Ekonomis
	- < 65 %	- Tidak Ekonomis
$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$	Nilai Kinerja Efisiensi	
	- < 90 %	- Sangat Efisien
	- 90 s.d 99%	- Efisien
	- 100 %	- Cukup Efisien
	- > 100 %	- Tidak Efisien
$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%$	Nilai Kinerja Efektivitas	
	- > 100 %	- Efektif
	- 85 s.d 100 %	- Cukup Efektif
	- 65 s.d 84 %	- Kurang Efektif
	- < 65 %	- Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2015:111) manajemen kinerja sektor publik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menganalisis kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dengan penerapan konsep *value for money* pada UPDT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang. Sebelum menggunakan konsep *value for money* terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan mengenai pengalokasian anggaran belanja, pendapatan dan kinerja keuangan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2017.

Anggaran Belanja dan Realisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengalokasian Anggaran

Rencana pengeluaran belanja pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang yang tercantum dalam perubahan Anggaran Tahun 2017 dan menjadi dasar perhitungan anggaran. Berikut adalah Anggaran belanja langsung sebesar Rp.1.053.834.200,- dengan realisasi sebesar Rp.1.029.975.100 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.051.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.005.328.000,-.

Anggaran dan realisasi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Tahun 2017

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
I.	Belanja Pegawai	1.051.600.000,-	1.005.328.000,-
	1. Total Besaran Penghasilan Tetap	558.600.000,-	534.200.000,-
	2. Total besaran tunjangan jabatan	211.800.000,-	197.000.000,-
	3. Tunjangan operasional	250.408.000,-	246.600.000,-
	4. Tunjangan kesehatan	30.792.000,-	27.528.000,-
	BELANJA LANGSUNG		
I.	Belanja Cetak		
	1. Cetak Buku Uji	200.000.000,-	200.000.000,-
	2. Cetak Plat Uji	325.910.000,-	317.172.000,-
	Total	525.910.000,-	517.172.000,-
II	Peningkatan Saran Prasarana	-	-
	1. Perbaikan alat pengujian kendaraan bermotor	146.400.000,-	146.400.000,-
	2. Kalibrasi pengujian kendaraan bermotor	50.000.000,-	49.900.000,-
	Total	196.400.000,-	196.300.000,-
III	Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1. Persediaan Alat Tulis Kantor	60.245.000,-	61.000.000,-
	2. Persediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	87.862.000,-	88.900.500,-
	3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	455.000
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional	53.673.000,-	55.550.000,-
	5. Penyediaan Makanan dan Minuman	7.050.000,-	6.345.400,-
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.594.200,-	32.594.200,-
	Total	241.924.200,-	244.845.100,-
IV	Peningkatan Kapasital Sumber Daya		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.550.000	25.113.600
V	Peningkatan Disiplin Aparatur		
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	54.050.000,-	46.545.000,-
	Total Belanja Langsung	Rp.1.053.834.200	Rp.1.029.975.100

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2017, data diolah, 2018

Seperti yang kita ketahui masalah dalam pengalokasian belanja terkait dengan keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), *tradeoffs* untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang.

Pengalokasian Target Pendapatan dan Realisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor

Seperti yang diketahui selain Anggaran Belanja untuk mengukur kinerja ada juga pendapatan, berikut lampiran Anggaran dan Realisasi Pendapatan Unit Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang tahun 2017 :

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017

No	Uraian	Target / Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Pendapatan	4.300.000.000,-	3.384.833.000,-
I	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
	1. Mobil angkutan khusus	251.017.500,-	206.184.000,-
	2. Mobil Bus	133.776.000,-	153.700.000,-
	3. Mobil barang	3.423.827.500,-	2.713.828.000,-
	4. Mobil khusus	375.104.000,-	194.534.000,-
	5. Kereta gandeng/temple	114.587.000,-	114.587.000,-
	6. Pembelian buku	1.688.000,-	2.000.000,-
	Total	4.300.000.000,-	3.384.833.000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2017, data di olah

Dapat dilihat dari tabel 3 pada tahun 2017 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang mempunyai target pendapatan yang cukup tinggi, namun di lihat dari tabel 3 pencapaian target sebesar Rp.4.300.000.000,- dan realisasinya Rp.3.384.833.000,- yang dimana selisih kurang sebesar Rp.915.167.000,- dari target yang sudah di anggarakan, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pada UPTD pengujian kendaraan bermotor kota Palembang belum dikatakan baik dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Kinerja Pada Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah dan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/20/20/M.PAN/11/2008 UPTD pengujian kendaraan bermotor menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja

Seperti yang di bahas pada bab sebelumnya bahwa metode pengukuran kinerja akan di lakukan dengan konsep *Value For Money* yang meliputi Ekonomi, Efisien, dan Efektivitas. Pengukuran kinerja dari masing-masing rasio sebagai berikut.

Pengukuran Ekonomi

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan

perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Pengukuran rasio Ekonomi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang dapat di lihat dari tabel 3 berikut ini :

Tabel 4
Rasio Ekonomi Program/Kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2017

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Rasio Ekonomi (%)
		A	B	$C=(A/B) \times 100\%$
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
I.	Belanja Pegawai	1.051.600.000,-	1.005.328.000,-	104,61
	1. Total Besar Penghasilan Tetap	558.600.000,-	534.200.000,-	104,56
	2. Total besaran tunjangan jabatan	211.800.000,-	197.000.000,-	107,51
	3. Tunjangan operasional	250.408.000,-	246.600.000,-	105,44
	4. Tunjangan kesehatan	30.792.000,-	27.528.000,-	111,85
	BELANJA LANGSUNG			
I.	Belanja Cetak			
	1. Cetak Buku Uji	200.000.000,-	200.000.000,-	100,00
	2. Plat Uji	325.910.000,-	317.172.000,-	102,75
	Total	525.910.000,-	517.172.000,-	101,68
II	Peningkatan Saran Prasarana	-	-	
	1. Perbaikan alat pengujian kendaraan bermotor	146.400.000,-	146.400.000,-	100,00
	2. Kalibrasi pengujian kendaraan bermotor	50.000.000,-	49.900.000,-	100,20
	Total	196.400.000,-	196.300.000,-	100,05
III	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Persediaan Alat Tulis Kantor	60.245.000,-	61.000.000,-	98,76
	2. Persediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	87.862.000,-	88.900.500,-	98,83
	3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	455.000	109,89
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional	53.673.000,-	55.550.000-	96,62
	5. Penyediaan Makanan dan Minuman	7.050.000,-	6.345.400,-	111,10
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.594.200,-	32.594.200,-	100,00
	Total	241.924.200,-	244.845.100,-	98,80
IV	Peningkatan Kapasital Sumber Daya			
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.550.000	25.113.600	141,55
V	Peningkatan Disiplin Aparatur			
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	54.050.000,-	46.545.000,-	116,55
	Total	1.053.834.200	1.029.975.100	102,31

Sumber : data diolah

Dari tabel 4 dapat diketahui belanja pada tahun 2017 ada pada kategori ekonomis dan cukup ekonomis. Kategori ekonomis >100 % ada 9 kegiatan/ program yaitu belanja pegawai, plat uji, perbaikan alat pengujian kendaraan bermotor, kalibrasi pengujian kendaraan bermotor,

penyediaan makan dan minum, pendidikan dan pelatihan formal dan pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu, di kategori cukup ekonomis 85 s.d 100 %ada 5 kegiatan/ program yaitu cetak buku uji, persediaan alat tulis kantor, persediaan peralatan dan perlengkapan kantor,

persediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas operasional, dan penyediaan jasa kebersihan kantor.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio ekonomi per program/kegiatan sebesar 96,62%-141,55%. Program/Kegiatan terendah nilai ekonomisnya adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional, namun masih masuk kategori cukup ekonomis karena rasionya sebesar 96,62%. Program tertinggi nilai ekonomisnya adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, hal ini sangat ekonomis karena rasionya sebesar 141,55% realisasi anggaran lebih kecil dari rencana anggaran. Sedangkan secara keseluruhan perhitungan anggaran adalah sebesar Rp.1.053.834.200,- dengan realisasi sebesar Rp.1.029.975.100,- atau 102,31 % dari pagu anggaran, hal ini dapat dikatakan ekonomis karena pencapaian kinerjanya lebih dari 100 %.

Pengukuran Efisiensi

Efisien merupakan pencapaian *Output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan nilai kinerja *output* per nilai kinerja input. Nilai kinerja *output* dapat diambil dari realisasi kinerja dan nilai kinerja *input* dapat diambil dari target setiap kegiatan pada UPTD pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang.

Pencapaian Target

Perencanaan target adalah suatu rancangan yang sudah disusun untuk mencapai sasaran target yang mempunyai pencapaian, mengenai realisasi dan efektivitas pencapaian kinerja penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Berikut Target dan Realisasi Pendapatan tahun 2017 :

Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017

No	Uraian	Target / Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio efisien (%)
	Pendapatan	4.300.000.000,-	3.384.833.000,-	
I	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			
	1. Mobil angkutan khusus	251.017.500,-	206.184.000,-	
	2. Mobil Bus	133.776.000,-	153.700.000,-	
	3. Mobil barang	3.423.827.500,-	2.713.828.000,-	
	4. Mobil khusus	375.104.000,-	194.534.000,-	
	5. Kereta gandeng/tempel	114.587.000,-	114.587.000,-	
	6. Pembelian buku	1.688.000,-	2.000.000,-	
	Total	4.300.000.000,-	3.384.833.000,-	127.03 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2017, data di olah

Dapat dilihat dari tabel 5 pada tahun 2017 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang mempunyai target pendapatan yang cukup tinggi, namun di lihat dari tabel 5 pencapaian target sebesar Rp.4.300.000.000,- dan realisasinya Rp.3.384.833.000,- yang dimana selisih kurang sebesar Rp.915.167.000,- dari target yang sudah di anggarakan, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pada UPTD pengujian kendaraan bermotor kota Palembang belum dikatakan baik dalam

penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Kesesuaian Pelayanan Pengujian

Unit ini dapat dikatakan berhasil karena analisis ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor kota Palembang. Kesesuaian pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur dengan melihat standar pelaksanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaan yang

terjadi dilapangan sampai dengan melihat hasil yang dikeluarkan. Berikut

dilampirkan kendaraan wajib uji pada tahun 2017:

Tabel 6
Kendaraan Wajib Uji Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2017

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan (unit)	Realisasi (unit)	Rasio efisien (%)
1.	Mobil Barang	57.642	57.360	
2.	Mobil Bus	1.403	1.283	
3.	Kendaraan Khusus	4.307	4.177	
4.	Mobil Penumpang Umum	2.593	2.451	
5.	Kereta Tempel/Gandeng	92	84	
Jumlah		66.037	65.355	101,7%

Sumber : Balai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang tahun 2017

Dapat dilihat dari tabel 5 dan 6 yang saling berhubungan antara Target retribusi yang tidak tercapaian dan kendaraan wajib uji yang terdaftar pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang tahun 2017, pencapaian target sebesar Rp.4.300.000.000,- dan realisasinya Rp.3.384.833.000,- yang dimana selisih kurang sebesar Rp.915.167.000,- dari target yang sudah di anggarakan dan jenis kendaraan wajib uji sejumlah 66.037 unit sedangkan realisasi kendaraan yang datang untuk uji kendaraan 65.355 unit dari analisis diatas jika di rata-ratakan jumlah rasio target retribusi dan kesesuaian pengujian hasil yang di dapat 0,79% dapat di katakan efisien karena rasio > 100 %.

Pengukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program

dengan target yang ditetapkan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*). Karena *output* yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud (*intangible*) yang mudah untuk di kuantifikasikan, sehingga ukuran efektivitas dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan (*judgment*).

Pada Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang *output* yang dihasilkan lebih banyak bersifat tidak berwujud dan tidak dapat di kuantitaskan. Rasio efektivitas UPTD Pengujian Kendaraan bermotor Kota Palembang yang dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel 7
Indikator Efektivitas Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2017

Dimensi	Indikator	Sub Indikator
A. Masukan	1. Sumber Daya Manusia	1) Sumber Daya Manusia dalam Permohonan Uji 2) Sumber Daya Manusia dalam Memverifikasi Dokumen/data 3) Sumber Daya Manusia dalam Pembayaran Upah Uji 4) Petugas Teknis Operasional
	2. Target Yang Dicapai	1) Jumlah Kendaraan Wajib Uji 2) Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
	3. Sarana dan Prasarana	1) Kelengkapan Peralatan Uji Kendaraan 2) Keadaan Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor 3) Fasilitas Diluar Peralatan Uji Kendaraan
B. Pengolahan (Proses Transformasi)	1. Perencanaan	1) Perencanaan Persyaratan, Mekanisme, dan prosedur Tetap Pengujian Kendaraan Bermotor Perencanaan Pemeriksaan Teknis Kendaraan 2) Perencanaan Target Yang Dicapai

	2. Pelaksanaan	1) Permohonan Uji Kendaraan 2) Memverifikasi dokumen 3) Pembayaran upah uji 4) Pemeriksaan fisik kendaraan
	3. Pengawasan	1) Pencatatan dan Pelaporan 2) Monitoring
C. Keluaran (output)	1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran	1) Kesesuaian Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2) Pencapaian Target

Sumber Daya Manusia

Analisis ini untuk melihat sumber daya manusia sebagai masukan dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di kota Palembang. Untuk menciptakan pelaksanaan yang baik dan dapat mencapai tujuan, tentu saja sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik secara rutin maupun periodik membutuhkan adanya faktor pendukung, salah satunya adalah kebutuhan sumber daya manusia untuk menjalankan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang, mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia disini tentunya adalah pejabat dan *staff* yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengujian

kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Saya contohnya sebagai salah satu tenaga pekerja yang ada disini.”(Wawancara, 2018).

Berdasarkan wawancara diatas, sumber daya manusia dalam hal ini adalah pekerja atau *staff* yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Sumber daya manusia tersebut terdiri dari tenaga-tenaga penguji yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu pejabat yang bertanggungjawab dalam teknis pengujian kendaraan bermotor telah berkompeten dalam menguji kendaraan bermotor, dan sedangkan pegawai administrasi berkompeten di bidang administrasi seperti pengarsipan, pemungutan retribusi dan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi.

Tabel 8
Jumlah Pejabat dan Staf Balai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Keterangan
1	Tenaga Penguji	10 Orang	Bersertifikat Kompetensi
2	Tenaga Administrasi	6 Orang	-
3	Tenaga Non PNS	6 Orang	-

Sumber: Balai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Tugas dan wewenang petugas teknis operasional ini tertuangkan dalam Peraturan Direktur Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Penguji Kendaraan Bermotor. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang, mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk bagian pemeriksa teknis harus memiliki tanda keahlian, artinya setiap petugas pemeriksa teknis harus melewati pelatihan kompetensi dalam pengujian kendaraan bermotor. Disini balai UPTD memiliki 10 petugas pemeriksa teknis yang sudah memiliki sertifikat kompetensi pengujian kendaraan bermotor.” (hasil wawancara, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa petugas teknis operasional di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dan memiliki sertifikat kompetensi pengujian kendaraan bermotor sehingga pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya petugas teknis operasional ini penguji kendaraan bermotor dapat memeriksa kendaraan yang akan di bawa

untuk beroperasi di jalan, dan menentukan apakah kendaraan tersebut sudah lulus pengujian atau tidak. Dilihat dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa petugas teknis operasional sudah baik, namun dilihat dari jumlahnya kurang memenuhi kebutuhan pengujian sebab dalam jumlah penguji yang ada itu sendiri terdiri dari pejabat yang memiliki lebih dari satu fungsi kerja sehingga tidak sesuai dengan jumlah kegiatan.

Tabel 9
Temuan Terhadap Indikator Sumber Daya Manusia

No.	Temuan	Sebab Akibat
1.	Dilakukan sosialisasi kepada pegawai atau staf guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik itu pada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.	Karena UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor membutuhkan sumber daya manusia yang baik dan berkompeten.
2.	Tenaga penguji kendaraan bermotor memiliki sertifikat kompetensi yang didapat melalui pendidikan khusus penguji kendaraan bermotor.	Karena petugas yang menguji kendaraan bermotor harus memiliki tanda kualifikasi atau tanda kompetensi.
3.	Sumber daya manusia dalam pembayaran upah uji hanya berjumlah 1 orang sehingga keterbatasan tenaga dalam informasi dan layanan pembayaran upah uji	Karena pelaksana tugas yang tepat pada kegiatan pembayaran upah uji hanya 1 orang.
4.	Petugas teknis oprasional di unit pelaksanaan teknis dinas pengujian kendaraan bermotor kota Palembang memerlukan penambahan jumlah pegawai.	Karena jumlah pegawai yang ada tidak seimbang dengan jumlah kegiatan pengujian.

Sumber: data diolah

Target yang dicapai

Analisis ini untuk melihat target yang dicapai dalam retribusi pengujian kendaraan bermotor kota Palembang. Target merupakan bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur dan akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya target sebagai masukan dari sebuah pelaksanaan maka akan diketahui apakah penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat mencapai tujuan yang maksimal atau tidak. Dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, target yang disusun terdiri dari jumlah kendaraan wajib uji dan target retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Adapun wawancara dengan Pejabat Kelompok Fungsional Balai UPTD

Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang mengatakan bahwa: “Pencapaian di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Palembang ditargetkan sesuai dengan perhitungan jangka waktu yang tepat, sedangkan pencapaian uji kendaraan bermotor harus memenuhi target yang ditentukan waktunya misalnya pencapaian target uji kendaraan harus tercapai dalam waktu setahun.” (hasil wawancara, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa taget di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Palembang belum berjalan dengan sesuai retribusi pengujian kendaraan bermotor dan belum tercapainya tujuan yang maksimal dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan

bermotor. Target yang disusun berjalan dengan efektif karena waktu yang tidak sesuai dengan target pencapaiannya.

Jumlah Kendaraan Wajib Uji

Analisis ini untuk melihat berapa jumlah kendaraan wajib uji yang ada di Kota Palembang dan juga dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. Data diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara dengan Pejabat Kelompok Fungsional Balai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Jumlah kendaraan wajib uji yang tercatat di UPTD Pengujian Kendaraan

Bermotor Kota Palembang ini tercatat setiap 6 bulan sekali atau dalam satu tahun berarti dua periode. Jumlah kendaraan ini dilihat dari jumlah taman kendaraan, dikarenakan jumlah kendaraan wajib uji yang masuk ataupun keluar setiap tahunnya selalu berubah jumlahnya, oleh karena itu setiap tahun jumlah kendaraan wajib uji yang tercatat disini bersifat berubah-ubah atau jumlahnya dapat bertambah atau berkurang, oleh karena itu dalam jumlah kendaraan di taman kendaraan sangat dibutuhkan, yang nantinya pada akhir tahun akan diakumulasikan untuk perkiraan jumlah kendaraan wajib uji pada tahun selanjutnya” (Wawancara, 2018)

Tabel 10
Jumlah Kendaraan Wajib Uji Tahun 2017

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
1.	Mobil Barang	57.642
2.	Mobil Bus	1.403
3.	Kendaraan Khusus	4.307
4.	Mobil Penumpang Umum	2.593
5.	Kereta Tempel/Gandeng	92
Jumlah		66.037

Sumber: Balai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan wajib uji dalam tahun 2014 mencapai 66.037 dihitung berdasarkan jumlah taman kendaraan dan jumlah kendaraan tersebut terdiri dari 57.642 kendaraan berjenis mobil barang, mobil bus dengan jumlah 1.403 kendaraan, kendaraan khusus berjumlah 4.307, mobil penumpang umum berjumlah 2.593, dan kereta tempel/gandeng dengan jumlah 92 kendaraan.

Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Analisis ini untuk melihat target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor kota Palembang. Dengan adanya target sebagai masukan dari sebuah pelaksanaan maka akan diketahui apakah suatu pekerjaan dapat mencapai tujuan yang maksimal atau tidak. Data yang

diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat bagian Tata Usaha di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Untuk mengetahui target retribusi pengujian kendaraan motor, kita dapat mengetahuinya dari jumlah tarif retribusi kendaraan dengan tarif pembelian buku uji dan disertai denda yang dikenakan wajib uji apabila lambat melakukan pengujian berulang. Target ini kita tentukan dari hasil pencapaian ditahun sebelumnya, dimana jumlah kendaraan tahun lalu dihitung menggunakan rumus perkalian yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan jumlah target retribusi yang akan dicapai.” (wawancara, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa target retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan

penjumlahan antara jumlah target dari tarif retribusi seluruh jenis kendaraan dengan target pembelian buku uji dan disertai denda yang akan didapat. Target yang

didapat ditentukan dari hasil pencapaian pengujian kendaraan bermotor ditahun sebelumnya.

Tabel 11
Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2017

No	Uraian	Target (Rupiah)
1	Mobil angkutan khusus	251.017.500,-
2	Mobil Bus	133.776.000,-
3	Mobil barang	3.423.827.500,-
4	Mobil khusus	375.104.000,-
5	Kereta gandeng/tempel	114.587.000,-
6	Pembelian buku	1.688.000,-
Jumlah		4.300.000.000,-

Sumber: Balai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2017

Sarana dan Prasarana

Analisis ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan berdasarkan sarana dan prasarana sebagai bagian dari masukan dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di kota Palembang. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Oleh karena itu sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di kota Palembang. Sarana dan prasarana dalam hal ini dapat berupa peralatan pengujian kendaraan bermotor, lokasi pengujian kendaraan bermotor, dan fasilitas penunjang lainnya.

Kelengkapan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana kelengkapan peralatan pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang. Kelengkapan peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan data pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang diketahui bahwa peralatan pengujian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

Tabel 12
Daftar Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Nama Alat	Fungsi	Jumlah
1.	Multi Gas Analyser	Untuk mengukur kadar CO dan HC	1
2.	Diesel Smoke Tester	Untuk mengukur ketebalan asap	1
3.	Sound Level Tester	Untuk mengukur kekuatan klakson/sirine	1
4.	Brake Tester	Untuk mengukur daya pengereman	1
5.	Heat Light Tester	Untuk mengukur kekuatan lampu	1
6.	Sider Slip Tester	Untuk mengukur penyimpangan arah roda depan	1
7.	Speedmeter Tester	Untuk mengukur kecepatan roda	1
8.	Generator compressor	Untuk daya listrik dan pengisian angin ban	1
9.	Pit Whell Suspension Tester	Untuk memeriksa bagian bawah kendaraan	1
10.	Axle Load Meter	Untuk menimbang berat sumbu kendaraan	1
11.	Tint Tester	Untuk mengukur persentase kegelapan kaca	1

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor kota Palembang, 2017

Tabel 13
Temuan Terhadap Indikator Sarana dan Prasarana

No.	Temuan	Sebab Akibat
1	Peralatan uji kendaraan sudah baik sehingga pelaksanaan berjalan dengan yang diinginkan, namun dalam hal perawatan peralatan pengujian masih dinilai kurang.	karena pemakaian yang terus menerus sedangkan peralatan yang tersedia sangat minim, dan peralatan uji kendaraan membutuhkan perawatan berkala dengan tepat.
2	Keadaan lokasi pengujian kendaraan bermotor di pergunakan dengan baik, akan tetapi letak lokasi pengujian kurang tepat.	Karena lokasi pengujian yang berada didaerah yang kendaraan bermotor sangat padat yang mengakibatkan kemacetan sering sekali ditemui, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kemauan pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.
3	Fasilitas di unit pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor yang terbatas sehingga kurangnya memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang menggunakan jasa uji kendaraan	Karena anggaran yang dibutuhkan untuk fasilitas yang lebih seperti yang diharapkan tersebut terbatas.

Sumber: Data diolah

Keluaran (output)

Keluaran merupakan hasil pelaksanaan dari kebijakan seperti yang telah ditetapkan pada tujuan sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaksanaan kebijakan tersebut yang berupa kriteria tertentu. Hasil dari keluaran tersebut akan dilihat dan dibandingkan dengan program yang sudah ditentukan.

Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan hasil pelaksanaan dari indikator keluaran dalam penyelenggaraan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang.

Pada analisis ini akan diuraikan, dianalisis serta dibahas hasil penelitian dari lapangan baik berupa hasil wawancara maupun melalui sumber data lainnya.

Pencapaian Target

Perencanaan target adalah suatu rancangan yang sudah disusun untuk mencapai sasaran target yang mempunyai pencapaian, mengenai realisasi dan efektivitas pencapaian kinerja penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, berikut dilampirkan target dan realisasinya 3 tahun terakhir 2015, 2016, dan 2017 sebagai berikut :

Tabel 14
Target Pendapatan dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2015 – 2017

Tahun	Target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	Realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor (%)
2015	3.954.300.000	3.519.021.580	88,99 %
2016	3.954.300.000	3.450.141.500	87,25 %
2017	4.300.000.000	3.384.833.000	78,72 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang 2015-2017

Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak stabil, dapat dilihat bahwa pendapatan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian

Kendaraan Bermotor Kota Palembang terus mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 1,74% dari jumlah kinerja penerimaan 88,99% pada tahun 2015 menjadi 87,25%, lalu tahun 2017 mengalami penurunan kinerja sebesar

8,53% dari jumlah realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2016 yang mencapai angka 87,25% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Kelompok Fungsional Balai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang, mengatakan bahwa:

“Harus dipahami, pendapatan yang dicapai menunjukkan kinerja yang dilakukan. Jika bertahun-tahun retribusi tidak tercapai, harus ada evaluasi yang dilakukan. Selain itu, kami menyayangkan beberapa perusahaan atau perorangan yang memiliki kendaraan wajib uji yang belum memiliki kesadaran atas kendaraannya untuk dilakukan pengujian. Hal ini harus menjadi perhatian bagi kami sebagai pelaksana pengujian kendaraan bermotor, apalagi target yang disusun tidak tercapai maksimal.” (hasil wawancara, 2018)

Berdasarkan hasil data diatas dapat diketahui bahwa pendapat yang dicapai merupakan bentuk dari kinerja yang dilakukan. Tinggi atau rendahnya pendapatan ditentukan oleh pemilik kendaraan yang bersifat perorangan atau milik perusahaan. Dapat diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji pada kendaraan wajib uji. Hal serupa disampaikan juga berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Administrasi di Balai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang yakni tingkat penerimaan kendaraan wajib uji itu sendiri. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pihak kami diketahui bahwa jumlah penerimaan retribusi yang didapat dari jumlah kendaraan bermotor wajib uji telah hampir memenuhi target yang UPTD

Pengujian Kendaraan Bermotor disusun meskipun tidak maksimal.” (Wawancara, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak tercapainya target yang maksimal dikarenakan tidak semua dari jumlah seluruh kendaraan wajib uji melakukan pengujian kendaraan bermotor. Hal tersebut disebabkan oleh pemilik kendaraan yang tidak disiplin, namun UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat mengetahui apa alasan jelas pemilik kendaraan wajib uji tidak melakukan wajib uji secara teratur. Hal serupa juga disampaikan oleh Pejabat Administrasi Balai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang, mengatakan bahwa:

“Seperti yang diketahui bahwa tidak semua sopir kendaraan wajib uji adalah pemilik dari kendaraan wajib uji. Contohnya seperti kendaraan kereta gandeng/tempel, pemilik kendaraan tersebut biasanya adalah perusahaan-perusahaan, dan yang mengetahui alasan tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor adalah sopir bahkan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sulit bagi kami untuk mengetahui latar belakang mengapa tidak melaksanakan pengujian kendaraan.” (hasil wawancara, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan kesimpulan bahwa Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Palembang dilaksanakan sudah efektif namun masih ada kekurangan dikarenakan pencapaian atau target yang ingin dicapai tidak sepenuhnya, pelaksanaan dalam jangka waktu yang ditetapkan sudah sesuai dengan standarnya, namun dilapangan tidak sesuai karena kurangnya tenaga atau sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan dari perbandingan hasil laporan ditahun sebelumnya, pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan retribusi sebesar 8,53 % dari pencapaian target retribusi ditahun sebelumnya. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran dari penerimaan retribusi

pengujian kendaraan bermotor ini sudah terlaksana dengan baik walaupun tidak

maksimal karena terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan.

Tabel 15
Temuan Terhadap Pencapaian Target

No.	Temuan	Sebab Akibat
1	Waktu pelaksanaan sudah sesuai dengan standar pelaksanaan, namun dilapangan tidak sesuai karena kurangnya tenaga atau sumber daya manusia yang dibutuhkan,	Akibatnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mempengaruhi target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor
2	Kenyamanan dan kelayakan masyarakat dalam berkendara masih banyak ditemukan kendaraan yang tidak layak pakai yang beroperasi di jalan raya	Sebab yang terjadi adalah kurangnya keasadaran masyarakat melakukan uji pada kendaraan bermotor wajib uji.
3	Tujuan dan sasaran dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor ini sudah terlaksana dengan baik walaupun tidak maksimal karena terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan	Tidak tercapainya target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 100%, yang didapat hanya 90,28% dari target yang ditentukan.

Sumber: Diolah oleh Penulis.

Berdasarkan Wawancara dan tabel 15 diatas dalam dilihat dari rasio efektivitas dan indikator-indikator yang dijabarkan dari *input* yaitu sumber daya manusia UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dikatakan mempunyai tenaga kerja yang baik, kemudian dari indikator saran dan parsaran dapat dikatakan baik, Peralatan uji kendaraan sudah baik sehingga pelaksanaan berjalan dengan yang diinginkan, namun dalam hal perawatan peralatan pengujian masih dinilai kurang.

Hasil pelaksanaan dengan tujuan dan sasaran bisa dikatakan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai namun akibat ditemukan kendala saat pelaksanaannya dan *feedback* yang dirasakan oleh lingkungan dari pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang maka pencapaian yang didapatkan tidak maksimal. Namun secara keseluruhan dari indikator diatas dapat dikatakan UPTD Pengujian Bermotor Kota Palembang sudah Cukup Baik.

Sosial Netto (Net Social Benefit)

Sosial netto atau *net social benefit* yaitu unit *outcome* yang berhasil.

1. Kesesuaian Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam Penilaian dan hasil wawancara unit ini dapat dikatakan berhasil karena analisis ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor kota Palembang. Kesesuaian pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur dengan melihat standar pelaksanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaan yang terjadi dilapangan sampai dengan melihat hasil yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang, mengatakan bahwa:

“Antara hasil pelaksanaan dengan tujuan dan sasaran bisa dikatakan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai namun akibat ditemukan kendala saat pelaksanaannya dan *feedback* yang dirasakan oleh lingkungan dari pengujian kendaraan bermotor di Kota Palembang maka pencapaian yang didapatkan tidak maksimal. Contoh *feedback* itu seperti kenyamanan dan kelayakan masyarakat dalam berkendara,

misalnya keadaan fisik sebuah kendaraan atau keadaan fasilitas berkendara. Selain itu, kesesuaian hasil pelaksanaan dengan

tujuan dan sasaran dapat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi pemilik kendaraan wajib uji itu sendiri.” (hasil wawancara, 2018).

Tabel 16
Kenaraan Wajib Uji Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2017

No	Jenis Kendaraan	Kendaraan (Unit)	Realisasi (Unit)
1.	Mobil Barang	57.642	57.360
2.	Mobil Bus	1.403	1.283
3.	Kendaraan Khusus	4.307	4.177
4.	Mobil Penumpang Umum	2.593	2.451
5.	Kereta Tempel/Gandeng	92	84
Jumlah		66.037	65.355

Sumber : Balai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang , 2017

Efisiensi Biaya (*Cost Efficiency*)

Efisiensi Biaya atau *Cost efficiency* adalah hubungan perbandingan antara anggaran biaya (*input*) dengan realisasi biaya (*output*). Perhitungan efisiensi biaya dapat dilihat dari selisih anggaran dan realisasi suatu indikator yang sedang dianalisis, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 17
Indikator Efisiensi Biaya (*Cost Efficiency*)

Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Nilai Kinerja
INPUT			
- Anggaran Belanja Langsung	1.053.834.200,-	1.029.970.100,-	102.31%
- SDM	22	22	100%
- Alat uji	11 Unit Peralatan	11 Unit Peralatan	100%
Rata-rata indikator <i>input</i>			100,7%
OUTPUT			
- Kesesuaian Pelayanan Pengujian	66.037 unit	65.355 unit	101,04%
- Pencapaian Target			
Rata-rata indikator <i>output</i>	4.300.000.000,-	3.384.833.000,-	127%
			114.02%

Sumber : Data diolah

Dapat dilihat dari nilai *input* sebesar Rp. 1.053.834.200,- dengan realisasi Rp. 1.029.970.100,- selisih Rp23.864.100,- dengan ini dapat disimpulkan bahwa dari segi input sudah dikatakan efisien karena realisasi anggaran tidak melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang, namun dilihat dari sisi *output* dapat dikatakan cukup efisien karena indikator nilai *output* di pencapaian target belum melampaui target yang sudah ditentukan pada tahun 2017.

Efektivitas Biaya (*Cost Effectiveness*)

Analisis efektivitas biaya meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai.

Dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel 16 dapat dilihat jika di analisis dapat dikatakan cukup efektivitas karena selisih dari anggaran dan realisasi tidak melebihi dari yang sudah ditentukan, disini penulis akan melihat *outcome* atau manfaat baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang yaitu,

1. Berkurangnya Polusi Udara
2. Berkurangnya kendaraan tidak layak jalan
3. Angka Kecelakaan

Dapat dilihat dari tiga *outcome* diatas bahwa dengan adanya Pengujian

kendaraan bermotor dapat mengurangi angka kecelakaan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Biaya manfaat *net social benefit* per *cost*, berikut tabel tarif pengujian kendaraan bermotor menurut jenisnya :

Tabel 18
Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor kota Palembang

Jenis	Tarif
Pengujian kendaraan bermotor	
a. Mobil bus	Rp 42.000
b. Mobil angkutan umum	Rp 41.000
c. Mobil barang	Rp 42.000
d. Mobil khusus	Rp 42.000
e. Kereta gandengan/temple	Rp 41.000
Biaya Administrasi	
a. Permohonan	Rp 2.500
b. Buku uji	Rp 10.000
c. 1 Pasang Plat Uji (Plat Keur)	Rp 5.000
d. Denda 2% perbulan	

Sumber : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang, 2017

Total pembayaran upah uji berasal dari tarif upah pengujian kendaraan bermotor berdasarkan masing-masing jenis kendaraan ditambah dengan biaya administrasi yaitu biaya permohonan uji, biaya beli buku uji, dan biaya pasang plat uji. Bagi kendaraan wajib uji yang terlambat melakukan pengujian kendaraan bermotor maka dikenakan biaya denda sebanyak 2% perbulan dari tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang ditentukan

Ukuran Pencapaian Output

Ukuran pencapaian *output* ialah hasil yang dapat dirasakan dari suatu proses, dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu :

Tabel 19
Ukuran Pencapaian Output UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang

Indikator	Hasil Wawancara	Ya	Tidak
Kelompok fungsional sudah melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai SOP	Kelompok fungsional melakukan sesuai dengan SOP yang ada	√	
Mengapa perlu diadakannya pengujian kendaraan bermotor	Melalui pengujian kendaraan bermotor diharapkan dapat menciptakan kendaraan yang layak dipakai, aman dan tertib, serta membantu pembangunan daerah melalui penerimaan retribusi.	√	
Mengapa penyedia perlu melakukan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor?	Dengan adanya retribusi pengujian kendaraan bermotor diharapkan dapat membantu serta mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah	√	
Apa manfaat dan tujuan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor?	peralatan sangat penting karena tanpa peralatan, kendaraan yang datang tidak bisa diuji. Alat-alat yang digunakan juga tidak sembarangan karena menggunakan alat mekanik yang berat. Oleh karena itu kami dari bagian pemeriksa teknis semaksimal mungkin harus mengontrol peralatan yang ada karena kurang satu alat pun proses pengujian bias	√	

Sumber : Data diolah

Dapat dilihat tabel 19 dari setiap indikator menyatakan kesesuaian dalam Pengujian Kendaraan Bermotor. Dari hasil wawancara pada tabel 16 dari 4 pertanyaan mengatakan kesesuaian dan Sangat Sesuai dengan hasil yang dapat dirasakan, karena kesesuaian dalam proses pengujian dapat berpengaruh ke dampak

Pencapaian Outcome

Pencapaian *outcome* ialah efek jangka panjang dari suatu proses tersebut, seperti yang telah di jabarkan di efektivitas biaya bahwa ada tiga *outcome* yaitu :

Tabel 20
Pencapaian Outcome Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2017

Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Nilai Kinerja
OUTCOME			
- Polusi Udara	12 bulan	12 bulan	100%
- kendaraan tidak layak jalan	105 keluhan/ tahun	35 kasus/ tahun	300%
- Angka Kecelakaan	0 kasus/ tahun		0 %
Rata-rata indikator outcome		0 kasus/ tahun	133.3%

Sumber : Data diolah

Penulis akan menjabarkan sedikit tentang angka kecelakaan, yang dimaksud juga dari efek dari suatu proses, tanpa disadari kurangnya ketaatan dan kesadaran diri perusahaan dan pribadi untuk menguji kendaraannya jika pengemudi rutin dalam pengujian maka pengemudi akan aman dalam berkendara karna sudah tahu kondisi kendaraan layak jalan atau tidak.

Polusi Udara yang dimaksud adalah setiap kendaraan yang melakukan uji kelayakan kendaraan sudah di pastikan layak jalan dan yang berdampak di pada baiknya polusi yang berasal dari kendaraan tersebut.

Pencapaian Kinerja Dengan Konsep Value For Money

Value For Money merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tingkat ekonomi digunakan untuk mengetahui *input*. Sumber daya dibawah anggaran menunjukkan penghematan, sedangkan diatas anggaran menunjukkan pemborosan. Efisien digunakan untuk mengukur seberapa baik organisasi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Efektif digunakan untuk mengukur dampak dari pembangunan yang dilakukan. Berikut ini merupakan penilaian kinerja *Value For Money* pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2017 :

Tabel 21
Indikator-indikator Pengukuran Kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang

Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Nilai Kinerja	Keterangan
INPUT				
- Anggaran Belanja Langsung	1.053.834.200,-	1.029.970.100,-	102.31%	Cukup Ekonomis
- SDM	22	22	100%	
- Alat uji	11 Unit Peralatan	11 Unit Peralatan	100%	
Rata-rata indikator			100,7%	
OUTPUT				
- Kesesuaian Pelayanan Pengujian	66.037 unit	65.355 unit	101,04%	Efisien
- Pencapaian Target	4.300.000.000,-	3.384.833.000,-	127.03%	
- Rata-rata indikator			0.79 %	

OUTCOME - Polusi Udara - kendaraan tidak layak jalan - Angka Kecelakaan - Rata-rata indikator <i>outcome</i>	12 bulan 105 keluhan/ tahun 0 kasus/ tahun	12 bulan 35 kasus/ tahun 0 kasus/ tahun	100% 300% 0%	Sangat Efektif
			133,3% 116,01%	
Nilai Akhir			116,01%	Berhasil

Sumber : Data diolah

Dapat dilihat dari nilai *input* sebesar Rp. 1.053.834.200,- dengan realisasi Rp. 1.029.970.100,- selisih Rp23.864.100,- dengan ini dapat disimpulkan bahwa dari segi *input* sudah dikatakan efisien karena realisasi anggaran tidak melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang, namun dilihat dari sisi *output* dapat dikatakan cukup efisien karena indikator nilai *output* di pencapaian target belum melampaui target yang sudah ditentukan pada tahun 2017, dari Tabel diatas dapat dilihat dari hasil akhir 116,01 % dinyatakan berhasil.

Tabel 22
Penilaian Kinerja 3E (Ekonomi, Efisien, Efektif)
Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2017

Kriteria Kinerja 3E	Nilai Kinerja	Keterangan
$Ekonomi = \frac{1.053.834.200}{1.029.970.100} \times 100\%$	102,31 %	Ekonomis
$Efisien = \frac{100,7\%}{0,79\%} \times 100\%$	127.4 %	Tidak Efisien
$Efktivitas = \frac{166,7\%}{114,03\%} \times 100\%$	146.18 %	Efektif

Sumber : data diolah

Dilihat dari tabel 22 dengan pengukuran kinerja 3E menurut Mahmudi (2013:111) pada kriteria ekonomi dengan nilai kinerja 102.31 atau >100% dinyatakan ekonomis, kriteria efisien dikatakan tidak efisien karena nilai kinerja 127.4% atau > 100 % dan kriteria efektivitas dinyatakan efektif dengan nilai kinerja 146.18 % atau > 100 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kinerja pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang Berdasarkan konsep *value for money* adalah baik. Maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Belanja pada tahun 2017 ada pada kategori ekonomis dan cukup ekonomis. Kategori ekonomis >100 % ada 9 kegiatan/program yaitu belanja pegawai, plat uji, perbaikan alat pengujian kendaraan bermotor, kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, penyediaan makan dan minum, pendidikan dan pelatihan formal dan pengadaan pakaian dinas khusus hari-

hari tertentu, di kategori cukup ekonomis 85 s.d 100 % ada 5 kegiatan/program yaitu cetak buku uji, persediaan alat tulis kantor, persediaan peralatan dan perlengkapan kantor, persediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas operasional, dan penyediaan jasa kebersihan kantor.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio ekonomi per kegiatan sebesar 96,62%-141,55%. Kegiatan terendah nilai ekonomisnya adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional, namun masih masuk kategori cukup ekonomis karena rasionya sebesar 96,62%. Program tertinggi nilai ekonomisnya adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan

formal, hal ini sangat ekonomis karena rasionya sebesar 141,55% realisasi anggaran lebih kecil dari rencana anggaran. Sedangkan secara keseluruhan perhitungan anggaran adalah sebesar Rp.1.053.834.200,- dengan realisasi sebesar Rp.1.029.975.100,- atau 102,31% dari pagu anggaran, hal ini dapat dikatakan ekonomis karena pencapaian kinerjanya lebih dari 100 %.

2. Pengukuran Efisien saling berhubungan antara Target retribusi yang tidak tercapaian dan kendaraan wajib uji yang terdaftar pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang tahun 2017, pencapaian target sebesar Rp.4.300.000.000,- dan realisasinya Rp.3.384.833.000,- yang dimana selisih kurang sebesar Rp.915.167.000,- dari target yang sudah di anggarakan dan jenis kendaraan wajib uji sejumlah 66.037 unit sedangkan realisasi kendaraan yang datang untuk uji kendaraan 65.355 unit dari analisis diatas jika di rata-ratakan jumlah rasio target retribusi dan kesesuaian pengujian hasil yang di dapat 127.4% dapat di katakan tidak efisien karena rasio > 100 %.
3. Pengukuran Efektivitas adalah *feedback* atau *outcome* yang terjadi pada Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang yaitu berkurangnya polusi Udara, berkurangnya kendaraan tidak layak jalan, Angka Kecelakaan dan dapat dilihat dari tiga *outcome* diatas bahwa dengan adanya Pengujian kendaraan bermotor dapat mengurangi angka kecelakaan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Saran

Saran yang diberikan berdasarkan simpulan di atas adalah :

1. Bagi UPTD Pengujian Kendaraan Bemotor Kota Palembang sebagai berikut :

- a. Perlunya perencanaan yang lebih matang lagi baik dari sisi perencanaan persyaratan, mekanisme, dan prosedur pengujian kendaraan bermotor, dan perencanaan mengenai target yang akan dicapai, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, melakukan pencatatan dan pelaporan dengan sistem elektronik agar dapat diakses oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor maupun Dinas Perhubungan kota Palembang, sehingga menciptakan pencatatan dan pelaporan yang transparansi Ekonomis, efektif, dan efisien, dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berkompeten, serta meningkatkan kualitas pegawai dengan melakukan sosialisasi terhadap pegawai dan staff yang ada di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor kota Palembang.
- b. Hendaknya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kota Palembang dari segi ekonomis dapat ditingkatkan dari tahun-tahun berikutnya.
- c. Hendaknya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kota Palembang melakukan edukasi lagi kepada masyarakat untuk melakukan tes uji kepada kendaraannya agar tujuan, visi, dan misi serta target UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kota Palembang dapat tercapai.

2. Bagi Peneliti Lain

- a. Sebaiknya mengambil sampel yang lebih luas, agar generalisasi dapat dilakukan dengan baik
- b. Sebaiknya dapat menggunakan rasio lainnya sebagai pendukung ketiga

rasio tersebut seperti rasio kemandirian dan rasio keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tito, Bastian. 2011. *Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor*, (Online), (<http://bastiantitof2f.blogspot.co.id/2011/06/pelayanan-pengujian-kendaraan-bermotor.html>, diakses pada tanggal 20 maret 2018).
- Wijaya, Dwi Utami Norma. 2011. *Kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*. Skripsi: Universitas Sebelas Maret.
- Rozzaq, Gozzali Ar. 2010. *Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta* Skripsi: Universitas Sebelas Maret.